

PUSAT JDIHN

# EVALUASI PENGELOLAAN JDIH S E - J A W A T I M U R

Oleh Pusat JDIHN  
BPHN-KEMENKUMHAM

 [jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)



## Profile Narasumber



Diden Priya Utama, S.Kom., merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1982, Diden Priya Utama memiliki pengalaman serta riwayat jabatan diantaranya menjabat sebagai Kepala Subbidang Digitalisasi Dokumen Hukum dan sekarang menjabat sebagai Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum – Pranata Komputer Muda sejak tahun 2022. Dengan latar belakang pendidikan S.Kom. (Sarjana Komputer), beliau memiliki keahlian dalam mengelola digitalisasi dokumen hukum. Beliau telah mengikuti Diklat PIM IV untuk pengembangan kemampuan manajerialnya. Dalam menjalankan tugasnya, beliau dapat dihubungi melalui nomor telepon 62 812-8245-515 atau melalui surel di [diden.odh@gmail.com](mailto:diden.odh@gmail.com).

## DASAR HUKUM JDIHN

- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL;
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PUU;
- PERMENKUMHAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM





## **JDIHN**

WADAH PENDAYAGUNAAN BERSAMA ATAS DOKUMEN HUKUM SECARA TERTIB, TERPADU, DAN BERKESINAMBUNGAN, SERTA MERUPAKAN SARANA PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI HUKUM SECARA LENGKAP, AKURAT, MUDAH, DAN CEPAT;

## **DOKUMEN HUKUM**

PRODUK HUKUM YANG BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PRODUK HUKUM SELAIN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELIPUTI NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PUTUSAN PENGADILAN, YURISPRUDENSI, MONOGRAFI HUKUM, ARTIKEL MAJALAH HUKUM, BUKU HUKUM, PENELITIAN HUKUM, PENGKAJIAN HUKUM, NASKAH AKADEMIS, DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

## Siapa yang Bergabung dalam JDIHN ?

### Pusat JDIHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional

### Anggota JDIHN

- Kementerian Negara
- Sekretariat Lembaga Negara
- Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Perpustakaan Hukum pada PTN dan PTS
- Lembaga Lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri



## TUGAS ANGGOTA JDIHN

- Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi

## FUNGSI ANGGOTA JDIHN

- Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
- Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- Penyediaan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi lingkungannya;
- Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.



**ANGGOTA JDIHN YANG MEMILIKI LAMAN JDIH  
SESUAI AMANAT PERPRES3 TAHUN 2012 TENTANG JDIHN  
(Kondisi : 1 Desember 2023)**

<b>Anggota JDIHN</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Memiliki Website JDIH</b>	<b>Sudah Integrasi</b>
Kementerian (di luar Kemenkumham)	33	33	33
Lembaga Negara	10	9	9
<b>LPNK</b>	32	31	29
Lembaga Non Struktural	40	18	16
Provinsi	38	35	34
Kabupaten	416	415	415
Kota	98	98	98
DPRD Provinsi	37	34	33
DPRD Kabupaten	415	393	392
DPRD Kota	93	93	93
Perpustakaan Hukum	400	31	26
Unit Eselon I Kemenkumham	11	11	11
Kanwil Kemenkumham	33	33	33
Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham	5	5	4
Lembaga Lain	2	2	1
<b>Total</b>	<b>1663</b>	<b>1236</b>	<b>1227</b>
<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>74%</b>

## APLIKASI JDIHN



### **JDIHN.GO.ID**

Portal pencarian dokumen hukum dan terintegrasi dengan seluruh anggota JDIH



### **BPHN.JDIHN.GO.ID**

Laman JDIH BPHN yang merupakan aplikasi standar pengolahan dokumen dan informasi hukum

ILDIS / Indonesian Legal Documentation Information System



### **E-REPORT.JDIHN.GO.ID**

Aplikasi pelaporan tahunan Anggota JDIH secara elektronik

# PORTAL JDIHN



# DOKUMEN HUKUM PADA JDIHN.GO.ID

KONDISI 1 DESEMBER 2023

101.45

1

PRODUK HUKUM  
Tk. Pusat

346.798

PRODUK HUKUM  
TINGKAT DAERAH

26.076

PRODUK HUKUM ERA  
KOLONIAL

35.046

MONOGRAFI HUKUM

44.10

9

ARTIKEL / MAJALAH  
HUKUM

5.222

YURISPRUDENSI /  
PUTUSAN

1.63

1

PERJANJIAN

385

DOKUMEN PERGURUAN  
TINGGI

8

3

INSTRUMEN  
INTERNASIONAL

**TOTAL**  
**560.801**

## PRODUK HUKUM TINGKAT PUSAT

- UD
- TAP MPR
- UU
- UU Darurat
- Pengaturan Penguasa Perang Tertinggi
- Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Kementerian
- Peraturan Lembaga Negara
- Peraturan LPNK
- Peraturan Lembaga Non Struktural
- Keputusan Menteri
- Keputusan Kepala LN
- Keputusan Kepala LPNK
- Surat Edaran



## PRODUK HUKUM TINGKAT DAERAH

- Peraturan Pemerintah Provinsi
- Peraturan Pemerintah Kota
- Peraturan Pemerintah Kabupaten
- Peraturan DPRD Provinsi
- Peraturan DPRD Kota
- Peraturan DPRD Kabupaten
- Peraturan Gubernur
- Peraturan Walikota
- Peraturan Bupati
- Peraturan Desa
- Peraturan Kepala Desa
- Keputusan Gubernur
- Keputusan Walikota
- Keputusan Bupati
- Keputusan Kepala Desa
- Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi
- Keputusan Pimpinan DPRD Kota
- Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
- Instruksi Gubernur
- Instruksi Walikota
- Instruksi Bupati
- Keputusan Rektor
- Keputusan Dekan
- Perjanjian Kerja Sama



## PRODUK HUKUM KOLONIAL

- STAATSBLAD
- STATUTEN
- OSAMU SEIREI
- OSAMU KANREI
- OSAMU GUNREI
- ZYOOREI
- SYUUREI

## MONOGRAFI HUKUM

- Buku Hukum
- Naskah Akademik
- Pengkajian Hukum dan HAM
- Pengkajian Kebijakan Hukum dan HAM
- Penelitian Hukum
- Pengkajian Hukum
- Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Thesis, dll)
- Taskap (Kertas Ilmiah Karya Perseorangan)
- Kompendium Hukum
- Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
- Risalah Sidang Pembahasan PUU



## ARTIKEL (MAJALAH HUKUM/ KLIPING KORAN)

- ARTIKEL HUKUM
- ARTIKEL ILMIAH
- KLIPING KORAN

## YURISPRUDENSI & PUTUSAN

- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
- YURISPRUDENSI (MAHKAMAH AGUNG - MA)
- KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)
- PUTUSAN SENGGKETA PEMILU (BAWASLU)



# STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Permenkumham No. 8 Tahun 2019



## TIDAK BERLAKU

Permenkumham  
No. 2 Tahun 2013  
tentang  
Standarisasi  
Pengelolaan  
Teknis  
Dokumentasi dan  
Informasi Hukum



LAMPIRAN

01

Standar Pembuatan  
Abstrak Peraturan PUU

02

Standar Pengolahan  
Dokumen dan Informasi  
Hukum

03

Standar Laporan Evaluasi  
Pengelolaan JDIH

# STANDAR PEMBUATAN ABSTRAK

Abstrak Peraturan Perundang-undangan adalah uraian ringkas suatu peraturan.

## KOMPONEN ABSTRAK

- Identitas Dokumen
- Dasar Pertimbangan
- Dasar Hukum
- Materi Pokok
- Catatan

## Teknis Pembuatan Abstrak :

- Menggunakan font Calibri, ukuran 11
- Penulisan Subjek, Tahun, Jenis, Nomor, Sumber dan Judul Peraturan menggunakan huruf kapital
- Meringkas dasar menimbang dan/atau penjelasan umum peraturan
- Dasar hukum ditulis secara hierarki dengan cara: singkatan jenis, nomor, dan tahun peraturan
- Materi pokok dengan meringkas isi di dalam batang tubuh
- Catatan (tanggal berlaku PUU terkait, Ket. Status, Lampiran

# STANDAR Pengolahan Dokumen & Informasi Hukum





# STANDAR Pengolahan Dokumen & Informasi Hukum

METADATA	PERATURAN	MONOGRAFI	ARTIKEL	PUTUSAN
Tipe Dokumen	#	#	#	#
Jenis Dokumen Hukum/Peradilan	#	#	#	#
Judul	#	#	#	#
T.E.U. Badan/Orang/Instansi/Pengarang	#	#	#	#
Nomor Peraturan/Putusan	#			#
Tahun Terbit	#	#	#	#
Singkatan Jenis/Bentuk	#			#
Tempat Penetapan/Terbit/Peradilan	#	#	#	#
Penerbit		#	#	#
Tanggal Penetapan/Pengundangan/Celucakan	#			#
Nomor Penggil		#		
Cetakan/Edisi		#		
Deskripsi File		#		
Subjek	#	#	#	#
Sumiter	#		#	#
ISBN/ISSN		#		
Status	#			#
Bahasa	#	#	#	#
Lokasi	#	#	#	#
Bidang Hukum/Jenis Perkara	#	#	#	#
Lampiran (Akses/dokumen/abstrak)	#	#	#	#
Nomor Induk Buku		#		
Pemastautangan	#			#
Urutan Pemerintahandi	#			
Peraturan Terkait dan Dokumen Terkait	#			#

# : Metadata Tambahan

# STANDAR

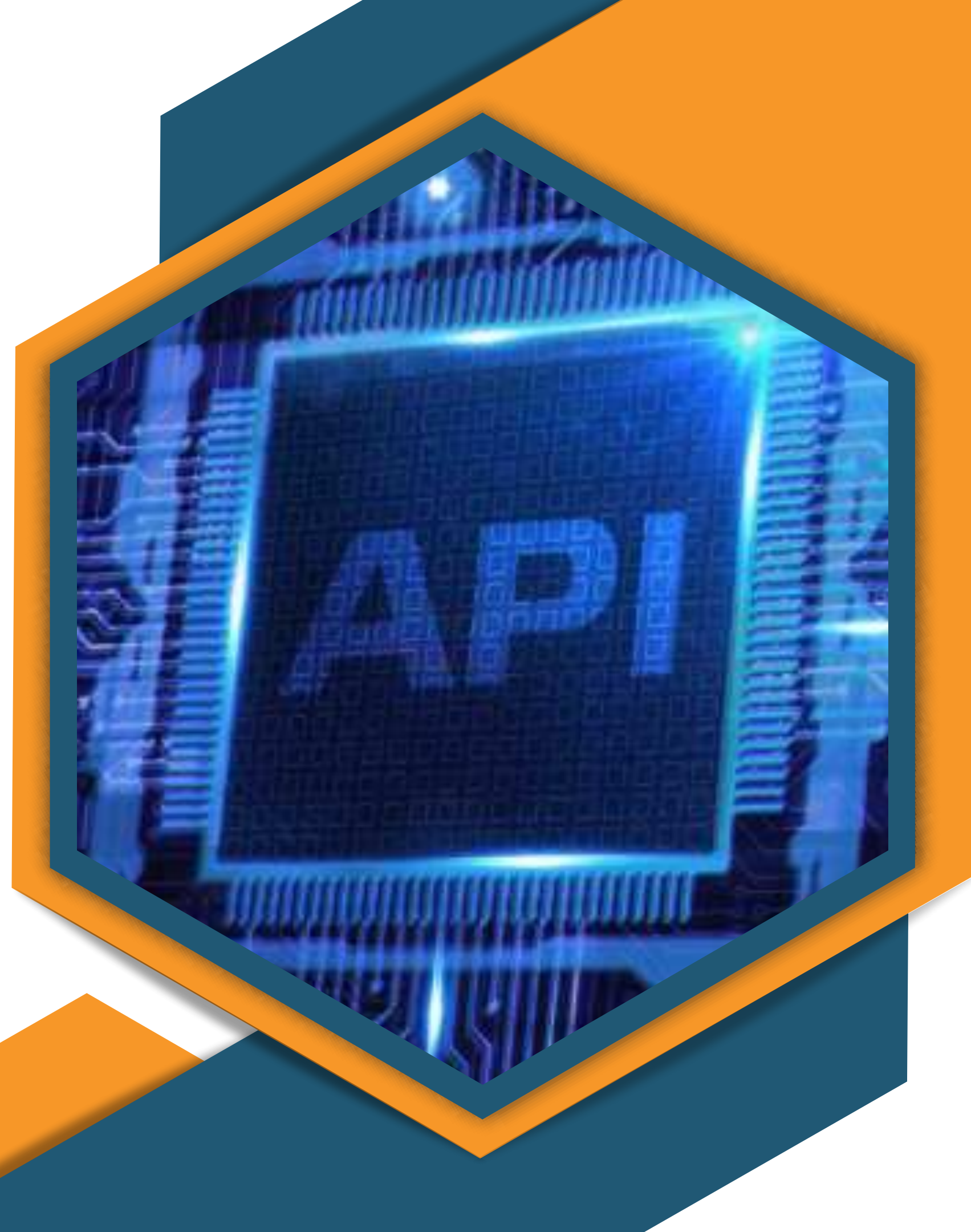
## Pengolahan Dokumen & Informasi Hukum

# INTEGRASI JDIHN

mengintegrasikan seluruh produk hukum yang ada pada database/server di masing-masing anggota jaringan, sehingga semua produk hukum yang diinput oleh anggota jaringan dapat diakses melalui satu sumber/mesin pencarian (search engine).

**Kewajiban Anggota JDIHN setelah terintegrasi dengan Portal [jdihn.go.id](http://jdihn.go.id):**

melakukan update sync secara berkala





# Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan JDIHN

Setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH Kepada Pusat JDIHN

## Dimana Pelaporan JDIH disampaikan ?

pelaporan secara elektronik melalui aplikasi e-reporting JDIHN

<https://e-report.jdihn.go.id/>



## Kapan Batas Akhir Penyampaian E-Report?

Laporan disampaikan pada setiap bulan Desember (Pasal 10 ayat (2) huruf f Perpres 33/2012 tentang JDIHN)



# CONTOH PENGISIAN METADATA

—



# Pengolahan Peraturan Perundang-Undangan

Meladala	Gara Pengesahan Meladala	Keterangan
<u>Jenis Peraturan</u>	Peraturan Daerah Kabupaten	
<u>Judul Peraturan</u>	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Sektor Kesehatan	Format Judul - Judul DITULIS LENGKAP TANPA DISINGKAT. Huruf Kapital hanya di tiap awal kata Kata tentang ditulis huruf <i>Awercase</i> semua
<u>Nomor</u>	5	Nomor peraturan ditulis tanpa ada angka 0
<u>Tahun Terbit</u>	2022	Tahun terbit peraturan
<u>Singkatan Jenis</u>	PERDA	Singkatan jenis peraturan
<u>Tanggal Penetapan</u>	10-11-2022	Tanggal penetapan peraturan
<u>Tanggal Pengundangan</u>	10-11-2022	Tanggal pengundangan peraturan
<u>T.E.U Badan</u>	Garut	Nama Provinsi
<u>Sumber</u>	LD Kabupaten Garut 2022 (5) - 11 hlm.	Format Sumber - Singkatan Lembar/Berita Daerah/Negara - Tahun - (Nomor Lembar Negara/Daerah) - jumlah Hlm
<u>Tempat Terbit</u>	Garut	Tempat Peraturan ditetapkan
<u>Bidang Hukum</u>	Hukum Administrasi Negara	Bidang hukum peraturan
<u>Subiek</u>	KESEHATAN - PERIZINAN	Format Subiek - Topik/ kata kunci dari isi peraturan (ditulis huruf capital/UPPERCASE)
<u>Bahasa</u>	Indonesia	
<u>Lokasi</u>	Biro Hukum Kabupaten Garut	Tempat Peraturan Fisik Disimpan

# Pengolahan Peraturan Perundang-Undangan

Metadata	Cara Penomoran Metadata	Keterangan
<u>Urusan Pemerintahan#</u>	# <u>Bidang Pemerintahan yang diatur</u>	Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007
<u>Penandatangan#</u>	RUDY GUNAWAN	Format Penandatangan : Tuliskan nama pejabat tanpa gelar dan jabatan
<u>Pemrakarsa#</u>	# <u>Unit yang menginisiasi peraturan tersebut</u>	instansi yang memprakarsai lahirnya peraturan ini
<u>Peraturan Terkait#</u>	<u>Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945</u> <u>UU 29 Tahun 2004</u>	Dasar yuridis pembentukan peraturan tersebut (Lihat <u>konsideran menimbang</u> ) * Peraturan target sudah diputuskan sebelumnya
<u>Dokumen Terkait#</u>	<u>Kajian Hukum</u> <u>Laporan</u>	Dokumen pendukung pembentukan peraturan tersebut * Dokumen target sudah diputuskan sebelumnya
<u>Status</u>	<u>Berlaku</u>	Status Utama Peraturan hanya BERLAKU dan TIDAK BERLAKU. Diengkapi dengan keterangan status. Dibuat link ke peraturan target, dengan syarat peraturan target sudah diputuskan sebelumnya
<u>Lampiran</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fulltext Dokumen Peraturan : 2022pd3205005.pdf</u></li> <li>• <u>Abstrak Peraturan : 2022abspd3205005.pdf</u></li> </ul>	Format Penamaan File : Peraturan pusat (4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis peraturan)(3 digit nomor peraturan) pdf  Peraturan Daerah: (4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis peraturan)(kodewilayah)(3 digit nomor peraturan) pdf  *Batang Tubuh, Penjelasan dan Lampiran Dokumen Peraturan harus menjadi satu kesatuan uluh dalam 1 file

**Kode Wilayah**

169	Kabupaten Bandung	3204
170	Kabupaten Garut	3205
171	Kabupaten Tasikmalaya	3206



# Pengolahan Monografi Hukum (NA)



Metadate	Cara Pengisian Metadate	Keterangan
<u>Jenis Monografi*</u>	<u>Huruf Akademik</u>	
<u>Judul*</u>	<u>Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata (penyalarsan)</u>	<u>Huruf Besar hanya di awal judul, selebihnya kecil semua</u>
<u>Tahun terbit*</u>	<u>2019</u>	
<u>Edisi</u>		<u>Tergantung dokumen</u>
<u>Nomor Pengasil</u>		<u>(nomor klasifikasi) + (2 huruf awal nama pengarang) + (huruf awal judul)</u>
<u>Tempat terbit*</u>	<u>DIJ Jakarta</u>	
<u>Penerbit*</u>	<u>Badan Pembinaan Hukum Nasional</u>	
<u>Deskripsi Fisik</u>		<u>Jumlah halaman termasuk pada buku, jml halaman buku, tlmngl buku</u>
<u>Bidang Hukum*</u>	<u>Hukum Perdata</u>	
<u>ISBN</u>		<u>Nomor ISBN buku</u>
<u>Eksemplar</u>		<u>Buku dengan judul yang sama namun memiliki nomor berbeda</u>
<u>Bahasa*</u>	<u>Indonesia</u>	
<u>Lebab</u>	<u>BPHN</u>	<u>Tempat dokumen fisik dikelola (nama instansi di singkat)</u>
<u>TEU Orang/Badan*</u>	<u>BPHN Pusat Perencanaan Hukum Nasional</u>	<u>Nama Pengarang (tanpa gelar dan dikalik)</u>
<u>Subjek*</u>	<u>RUU - HUKUM ACARA PERDATA</u>	<u>Topik/ kata kunci dari isi dokumen</u>
<u>Lampiran*</u>	<u>2019_na_rui_haper(penyalarasan).pdf</u>	<u>Dibuatlikan buku komersil karena berkaitan dengan hak cipta</u>
<u>Gambar Sampul</u>		<u>Foto cover sampul buku</u>

\*Metadate monografi yang wajib diisi

# Pengolahan Monografi Hukum (Buku)



Metadata	Cara Pengisian Metadata	Keterangan
Jenis Monografi*	Buku Hukum	
Judul*	Konsep hukum perdata	Huruf Besar hanya diawal judul, selebihnya kecil semua
Tahun terbit*	2014	Tahun terbit buku
Edisi	Cet. 1	Tergantung dokumen
Nomor Panggil	347 FUA k	(nomor klasifikasi) + (3 huruf awal nama pengarang) + (huruf awal judul)
Nomor Induk Buku	1234	Nomor urut registrasi buku pada buku induk
Tempat terbit*	Jakarta	Tempat Buku diterbitkan
Penerbit*	RAJA GRAFINDO PERSADA	Penerbit Buku
Deskripsi fisik	X, 312 HLM. ; 23CM	Jumlah halaman romawi pada buku, jml halaman buku, tinggi buku
Bidang Hukum*	Hukum Perdata	Bidang Hukum
ISBN	978-979-769-765-5	Nomor ISBN buku
Eksemplar		
Bahasa*	Indonesia	
Lokasi	PERPUSTAKAAN BIRO HUKUM Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tempat dokumen fisik dikelola (nama instansi disingkat)
TEU Orang/Badan*	FUADY, MUNIR	Nama Pengarang (tanpa gelar dan dibalik)
Subjek*	HUKUM PERDATA	Topik/ kata kunci dari isi dokumen
Lampiran*	Dikecualikan buku komersil karena berkaitan dengan hak cipta	
Gambar Sampul		Foto cover sampul buku

Body

\*Metadata monografi yang wajib diisi

# Pengolahan Artikel Hukum

Metadada	Cara Pengisian Metadada	Keterangan
Tipe Dokumen	Artikel Hukum	
Judul	Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional (Renewable Energy Governance In The Electricity Sector In The National Law Development Frame Work)	Tuliskan judul artikel yang terdapat dalam Majalah Hukum
Tempat Terbit	Jakarta	Tempat artikel diterbitkan
Tahun	2019	Tahun terbit artikel
Bahasa	Indonesia	
Sumber	MAJALAH HUKUM NASIONAL (NO.2), 2019, 29-56	Sumber artikel Format sumber: Nama majalah/koran – tgl/bln/tahun terbit – hlmn & kolom artikel
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara	Bidang hukum yang dibahas dalam artikel
Lokasi	BPHN	Tempat dokumen fisik dikelola (nama instansi disingkat)
TEU Orang / Badan	Febriananingsih, Nunuk	Nama tokoh pengarang/instansi yang membuat artikel pada majalah hukum (tanpa gelar dan dibalik)
Subjek	KETENAGALISTRIKAN-PEMBANGUNAN HUKUM	Topik/ kata kunci dari isi dokumen
File Dokumen	MHN-02-2019-29-56.pdf	File Pdf, dengan format : nama majalah-edisi-tahun-halaman jurnal



# Pengolahan Putusan



Metadatta	Cara Pengisian Metadatta	Keterangan
Jenis Putusan	Putusan Mahkamah Agung	
Judul	Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 PK/Pdt/2016 tahun 2016 Rico Widjaya vs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Sekalah Tinggi Pariwisata Bandung, Dkk	Fermat judul : Nama jenis putusan – nomor putusan - tahun putusan – para pihak yang berperkara
T.E.U Badan	Indonesia, Mahkamah Agung	Lembaga yang bertanggung jawab atas isi putusan
Nomor Putusan	319 PK/Pdt/2016	Nomor putusan
Jenis Peradilan	Mahkamah Agung	Jenis peradilan yang memutuskan perkara
Singkatan Jenis Peradilan	MA	Singkatan dari jenis peradilan
Tempat Peradilan	Jakarta	Kota tempat perkara diputuskan
Tanggal dibacakan	26 Juli 2016	Tanggal putusan dibacakan
Sumber	Mahkamah Agung	Sumber putusan
Subjek	SENGKETA TANAH	Pokok perkara dalam putusan
Status Putusan	TETAP	Status putusan pengadilan
Bahasa	Indonesia	
Bidang Hukum/Jenis Perkara	Hukum Perdata	Jenis perkara dari pokok perkara
Lampiran	2016MA0031319PK/Pdt/2016.pdf	4 digit tahun perkara+singkatan peradilan+4 digit kode wilayah+nomor putusan

# TUTORIAL VIDEO

Pedoman Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Website JDIH



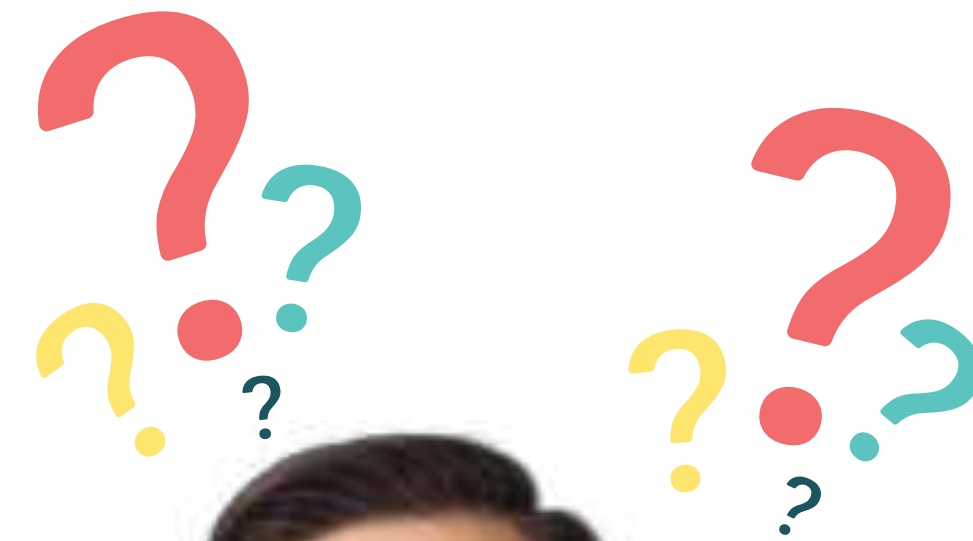
silahkan scan disini :

# Tutorial



# BAGAIMANAKAH ?

HASIL EVALUASI PENGELOLAAN  
JDIH SE-PROV JAWA TIMUR



# ASPEK DAN BOBOT YANG DINILAI

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT NILAI	KETERANGAN
1	ORGANISASI / KELEMBAGAAN	4	4 indikator
2	SUMBER DAYA MANUSIA	2	2 indikator
3	KOLEKSI DOKUMEN HUKUM	7	4 indikator
4	TEKNIS PENGELOLAAN	15	4 indikator
5	SARANA PRASARANA	4	2 indikator
6	PEMANFATAAN T.I.K.	59	10 indikator
7	PROMOSI & INOVASI	9	6 indikator
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>32 indikator</b>



## 32 INDIKATOR YANG DINILAI DAN NILAI MAKSIMAL . . .

- 1.Dasar Hukum(1)
- 2.Struktur Organisasi(1)
- 3.Tim Pengelola (1)
- 4.Kontak (1)
- 5.Data Pengelola JDIH (1)
- 6.Data Kegiatan yg diikuti(1)
- 7.Koleksi PUU (3)
- 8.Koleksi Non PUU (2)
- 9.Koleksi Dokumen Hukum Lainnya (1)
- 10.Terjemahan Dok Hukum dalam Bahasa Asing (1)
- 11.Penyampaian laporan melalui e-Report JDIH (10)
- 12.SOP (1)
- 13.Standar Metadata (2)
- 14.Abstrak (2)
- 15.Ruang JDIH / Perpustakaan Hukum (2)
- 16.Alat Pengolah Data & Akses Internet (2)
- 17.Website JDIH (25)
- 18.Integrasi Website JDIH dengan Portal JDIHN (25)
- 19.Logo JDIHN(1)
- 20.Fitur Search Engine(1)
- 21.Fitur IKM(1)
- 22.Hyperlink ke Portal JDIHN (1)
- 23.Hyperlink dari website utama ke website JDIH (1)
- 24.Fitur keamanan website (1)
- 25.Aplikasi JDIH Mobile (Android, IOS) (2)
- 26.Kios Informasi Elektronik JDIH(1)
- 27.Sosialisasi / Promosi JDIH melalui media elektronik (1)
- 28.Sosialisasi / Promosi JDIH melalui media massa dan/atau media sosial (2)
- 29.Pemanfaatan informasi melalui website (1)
- 30.Kegiatan Rakor / Bimtek (2)
- 31.Kegiatan Benchmarking (1)
- 32.Inovasi lain yg relevan (2)



# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN N 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
1	Kantor Wilayah Jawa Timur	Kantor Wilayah	85	83		Eka Acalapati	17
2	Provinsi Jawa Timur	Provinsi	85	90		Eka Acalapati	8
3	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten	56	64		Dwi Tungga	181
4	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten	97	99		Eka Acalapati	1
5	Kabupaten Blitar	Kabupaten	76	76		Dwi Tungga	74
6	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten	61	62		Dwi Tungga	207
7	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten	62	63		Dwi Tungga	193
8	Kabupaten Gresik	Kabupaten	80	71		Dwi Tungga	124
9	Kabupaten Jember	Kabupaten	59	58		Dwi Tungga	248
10	Kabupaten Jombang	Kabupaten	75	59		Dwi Tungga	240

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
11	Kabupaten Kediri	Kabupaten	59	68		Dwi Tungga	148
12	Kabupaten Lamongan	Kabupaten	70	74		Dwi Tungga	91
13	Kabupaten Lumajang	Kabupaten	61	63		Dwi Tungga	197
14	Kabupaten Madiun	Kabupaten	77	58		Dwi Tungga	250
15	Kabupaten Magetan	Kabupaten	64	78		Eka Acalapati	61
16	Kabupaten Malang	Kabupaten	57	64		Dwi Tungga	189
17	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten	58	73		Dwi Tungga	103
18	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten	71	82		Eka Acalapati	42
19	Kabupaten Ngawi	Kabupaten	51	70		Dwi Tungga	132
20	Kabupaten Pacitan	Kabupaten	59	80		Eka Acalapati	50

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2021	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
21	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten	53	71		Dwi Tungga	126
22	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten	86	63		Dwi Tungga	199
23	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten	78	76		Eka Acalapati	79
24	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten	57	63		Dwi Tungga	201
25	Kabupaten Sampang	Kabupaten	73	45		Tri Buntara	305
26	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten	74	65		Dwi Tungga	177
27	Kabupaten Situbondo	Kabupaten	82	79		Eka Acalapati	56
28	Kabupaten Sumenep	Kabupaten	67	67		Dwi Tungga	163
29	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten	62	73		Dwi Tungga	108
30	Kabupaten Tuban	Kabupaten	85	86		Eka Acalapati	25

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
31	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten	56	66		Dwi Tungga	170
32	Kota Batu	Kota	73	67		Dwi Tungga	52
33	Kota Blitar	Kota	66	65		Dwi Tungga	58
34	Kota Kediri	Kota	55	58		Dwi Tungga	72
35	Kota Madiun	Kota	76	78		Eka Acalapati	28
36	Kota Malang	Kota	72	65		Dwi Tungga	59
37	Kota Mojokerto	Kota	58	67		Dwi Tungga	53
38	Kota Pasuruan	Kota	60	72		Dwi Tungga	43
39	Kota Probolinggo	Kota	78	68		Dwi Tungga	51
40	Kota Surabaya	Kota	73	87		Eka Acalapati	10

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
41	DPRD Provinsi Jawa Timur	DPRD Provinsi	58	63		Dwi Tungga	4
42	DPRD Kabupaten Bangkalan	DPRD Kabupaten	59	47		Tri Buntara	134
43	DPRD Kabupaten Banyuwangi	DPRD Kabupaten	59	0			
44	DPRD Kabupaten Blitar	DPRD Kabupaten	58	47		Tri Buntara	135
45	DPRD Kabupaten Bojonegoro	DPRD Kabupaten	59	52		Dwi Tungga	102
46	DPRD Kabupaten Bondowoso	DPRD Kabupaten	60	52		Dwi Tungga	103
47	DPRD Kabupaten Gresik	DPRD Kabupaten	58	51		Dwi Tungga	108
48	DPRD Kabupaten Jember	DPRD Kabupaten	59	69		Dwi Tungga	25
49	DPRD Kabupaten Jombang	DPRD Kabupaten	59	41		Tri Buntara	153
50	DPRD Kabupaten Kediri	DPRD Kabupaten	57	41		Tri Buntara	156

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
51	DPRD Kabupaten Lamongan	DPRD Kabupaten	54	0			
52	DPRD Kabupaten Lumajang	DPRD Kabupaten	55	59		Dwi Tungga	<b>72</b>
53	DPRD Kabupaten Madiun	DPRD Kabupaten	58	68		Dwi Tungga	<b>29</b>
54	DPRD Kabupaten Magetan	DPRD Kabupaten	58	49		Tri Buntara	<b>120</b>
55	DPRD Kabupaten Malang	DPRD Kabupaten	57	50		Tri Buntara	<b>117</b>
56	DPRD Kabupaten Mojokerto	DPRD Kabupaten	57	46		Tri Buntara	<b>139</b>
57	DPRD Kabupaten Nganjuk	DPRD Kabupaten	61				
58	DPRD Kabupaten Ngawi	DPRD Kabupaten	61				
59	DPRD Kabupaten Pacitan	DPRD Kabupaten	61	40		Tri Buntara	<b>164</b>
60	DPRD Kabupaten Pamekasan	DPRD Kabupaten	61	50		Tri Buntara	<b>118</b>

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
61	DPRD Kabupaten Pasuruan	DPRD Kabupaten	58	58		Dwi Tungga	81
62	DPRD Kabupaten Ponorogo	DPRD Kabupaten	57	67		Dwi Tungga	34
63	DPRD Kabupaten Probolinggo	DPRD Kabupaten	58	0			
64	DPRD Kabupaten Sampang	DPRD Kabupaten	59	60		Dwi Tungga	68
65	DPRD Kabupaten Sidoarjo	DPRD Kabupaten	69	45		Tri Buntara	142
66	DPRD Kabupaten Situbondo	DPRD Kabupaten	59	39		Tri Buntara	185
67	DPRD Kabupaten Sumenep	DPRD Kabupaten	62	49		Tri Buntara	123
68	DPRD Kabupaten Trenggalek	DPRD Kabupaten	59	56		Dwi Tungga	95
69	DPRD Kabupaten Tuban	DPRD Kabupaten	59	48		Tri Buntara	129
70	DPRD Kabupaten Tulungagung	DPRD Kabupaten	59	48		Dwi Tungga	131

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
71	DPRD Kota Batu	DPRD Kota	57	40		Tri Buntara	39
72	DPRD Kota Blitar	DPRD Kota	57	50		Tri Buntara	32
73	DPRD Kota Kediri	DPRD Kota	57	53		Dwi Tungga	28
74	DPRD Kota Madiun	DPRD Kota	57	63		Dwi Tungga	11
75	DPRD Kota Malang	DPRD Kota	58	62		Dwi Tungga	13
76	DPRD Kota Mojokerto	DPRD Kota	58	52		Dwi Tungga	29
77	DPRD Kota Pasuruan	DPRD Kota	58	58		Dwi Tungga	24
78	DPRD Kota Probolinggo	DPRD Kota	58	41		Tri Buntara	37
79	DPRD Kota Surabaya	DPRD Kota	58	61		Dwi Tungga	16
80	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman	Perguruan Tinggi					

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
81	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri	Perguruan Tinggi					
82	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan	Perguruan Tinggi					
83	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Perguruan Tinggi					
84	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Perguruan Tinggi					
85	Universitas 45 Surabaya	Perguruan Tinggi					
86	Universitas Abdurachman Saleh	Perguruan Tinggi					
87	Universitas Airlangga	Perguruan Tinggi		56		Dwi Tungga	17
88	Universitas Bakti Indonesia	Perguruan Tinggi					
89	Universitas Bhayangkara Surabaya	Perguruan Tinggi					
90	Universitas Bojonegoro	Perguruan Tinggi					

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
91	Universitas Bondowoso	Perguruan Tinggi					
92	Universitas Brawijaya	Perguruan Tinggi					
93	Universitas Darul ulum	Perguruan Tinggi					
94	Universitas Dr Soetomo	Perguruan Tinggi					
95	Universitas Gresik	Perguruan Tinggi					
96	Universitas Hang Tuah	Perguruan Tinggi					
97	Universitas Islam Balitar	Perguruan Tinggi					
98	Universitas Islam Darul 'ulum	Perguruan Tinggi					
99	Universitas Islam Jember	Perguruan Tinggi					
100	Universitas Islam Kediri	Perguruan Tinggi					

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
101	Universitas Islam Lamongan	Perguruan Tinggi					
102	Universitas Islam Madura	Perguruan Tinggi					
103	Universitas Islam Malang	Perguruan Tinggi					
104	Universitas Jember	Perguruan Tinggi		38		Tri Buntara	21
105	Universitas Kediri	Perguruan Tinggi					
106	Universitas Kanjuruhan	Perguruan Tinggi					
107	Universitas Kartini	Perguruan Tinggi					
108	Universitas Katolik Darma Cendika	Perguruan Tinggi					
109	Universitas Katolik Widya Karya	Perguruan Tinggi					
110	Universitas Kristen Cipta Wacana	Perguruan Tinggi					

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
111	Universitas Lumajang	Perguruan Tinggi					
112	Universitas Maarif Hasyim Latif	Perguruan Tinggi					
113	Universitas Madura	Perguruan Tinggi					
114	Universitas Mayjen Sungkono	Perguruan Tinggi					
115	Universitas Merdeka Madiun	Perguruan Tinggi					
116	Universitas Merdeka Malang	Perguruan Tinggi					
117	Universitas Merdeka Pasuruan	Perguruan Tinggi					
118	Universitas Merdeka Ponorogo	Perguruan Tinggi					
119	Universitas Merdeka Surabaya	Perguruan Tinggi					
120	Universitas Mochammad Sroedji	Perguruan Tinggi					

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
121	Universitas Muhammadiyah Jember						
122	Universitas Muhammadiyah Malang						
123	Universitas Muhammadiyah Ponorogo						
124	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo						
125	Universitas Muhammadiyah Surabaya						
126	Universitas Narotama			59		Dwi Tungga	14
127	Universitas Negeri Surabaya						
128	Universitas Panca Marga						
129	Universitas Pelita Harapan Surabaya						
130	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur						

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN N 2022	PENILAIAN 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
131	Universitas Soerjo						
132	Universitas Sunan Bonang						
133	Universitas Sunan Giri						
134	Universitas Surabaya						
135	Universitas Teknologi Surabaya						
136	Universitas Trunojoyo						
137	Universitas Tulungagung						
138	Universitas Widya Gama						
139	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya						
140	Universitas Wijaya Putra						

# REKAP PENILAIAN ANGGOTA JDIH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	KATEGORI INSTANSI	PENILAIAN N 2022	PENILAIAN N 2023	KET	KATEGORI PENILAIAN	PERINGKAT
141	Universitas Wiraraja						
142	Universitas Wisnuwardhana						
143	Universitas Yos Sudarso						



## PERAN STRATEGIS JDIH



**SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK**



**SATU DATA INDONESIA**



**INDEKS REFORMASI  
HUKUM**



**DESA/  
KELURAHAN SADAR  
HUKUM**

# RAGAM INOVASI



## JDIH KPU

### FITUR GLOSARIUM

Menampilkan kumpulan istilah yang sering digunakan dalam pemilihan



## JDIH KPPPA

### Fitur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan & Partisipasi Publik

Bisnis Proses Pembentukan Perundang-Undangan Melalui JDIH dengan melibatkan masyarakat melalui fitur Partisipasi Masyarakat

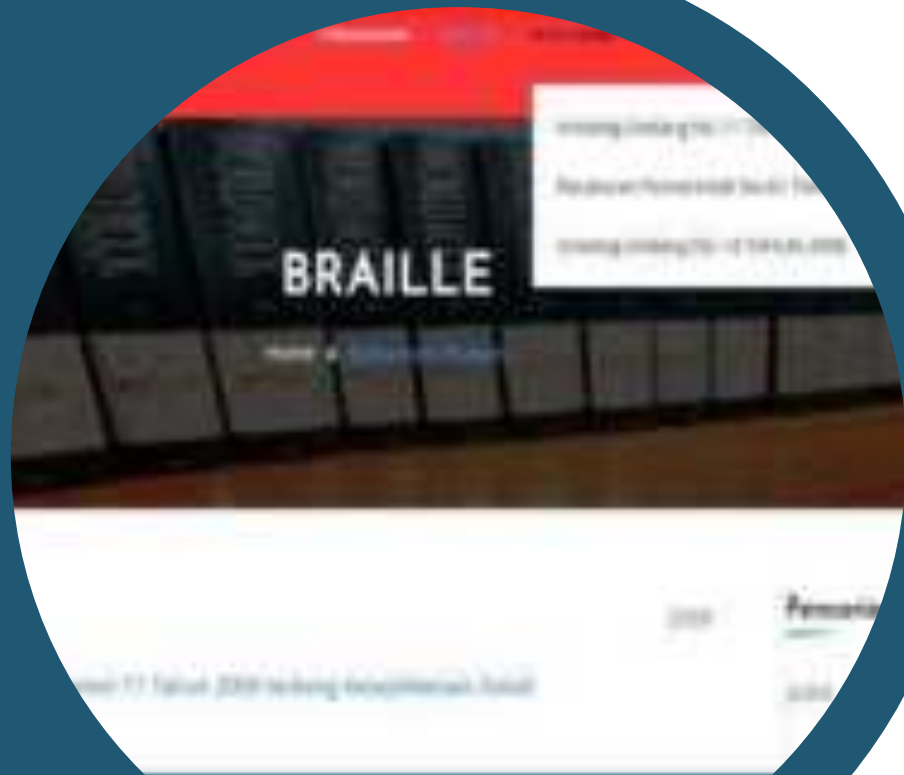


## JDIH KKP

### Menu Berlangganan

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan website tidak hanya digunakan sebagai media informasi saja, namun juga sebagai media untuk mendekatkan KKP dengan para Stakeholders.

# RAGAM INOVASI



## JDIH KEMSOS

Menu Braille

merupakan menu pada website JDIH yang berisi informasi metadata dokumen hukum yang sudah dialihhuruf ke Braille, untuk mengakses dokumen yang sudah dialihhuruf ini dapat datang ke Dokumentasi Hukum, pada Biro Hukum Kementerian Sosial.



## JDIH KEMENKEU

Pencarian Fulltext PDF

Pencarian Full text bagian, pasal, ayat, dst melalui Search Engine Website JDIH



## JDIH KAB. GRESIK

Fitur Abstrak FAQ Chat

Fitur abstrak FAQ chat pada website JDIH Kabupaten Gresik yang menggunakan AI

# RAGAM INOVASI



## JDIH KAB. BANYUWANGI

JDIH Masuk Desa,  
Aplikasi Induksi Sapu Wangi,  
Aplikasi Somasi Kami, dan Pembuatan Video  
Bahasa Isyarat

Pojok JDIH di Desa-Desa,  
Beberapa Aplikasi Pelayanan  
Informasi Hukum pada website  
JDIH Kabupaten Banyuwangi,  
dan Upaya Publikasi JDIH pada  
Disabilitas

# **BAGAIMANA DENGAN RINCIAN INDIKATOR PENILAIAN TERBARU?**

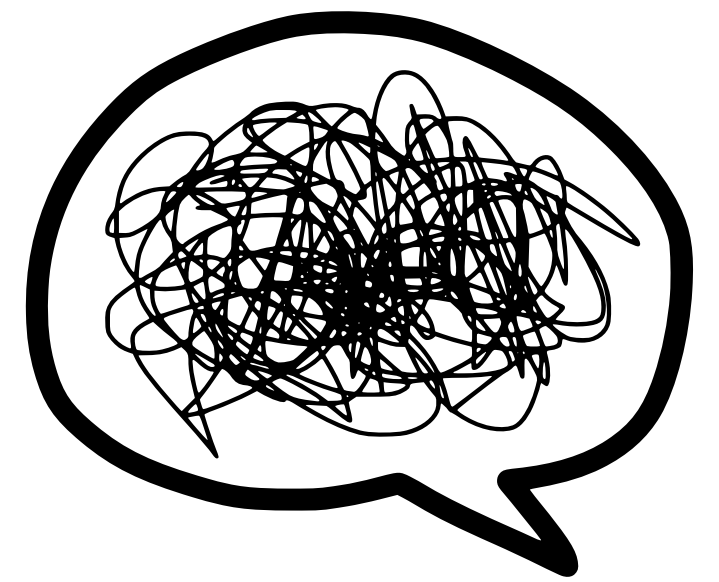
**TELAH TERBIT  
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN  
PENGELOLAAN JDIHN  
NOMOR : PHN.HN.03.05.87  
PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2023**



# KATEGORI PENGELOLAAN JDIH TAHUN 2024



# APA SAJA ASPEK DAN BOBOT YANG DINILAI (TAHUN 2024) ?



# ASPEK DAN BOBOT YANG DINILAI (TAHUN 2024)

- 1.Dasar Hukum(3)
- 2.Struktur Organisasi (2)
- 3.Tim Pengelola (2)
- 4.Kontak (1)
- 5.Data Pengelola JDIH (1)
- 6.Data Kegiatan yg diikuti(2)
- 7.Koleksi PUU (3)
- 8.Monografi(2)
- 9.Artikel(1)
- 10.Putusan(1)
- 11.Dokumen Hukum Langka (1)
- 12.English Version (3)
- 13.Penyampaian Laporan (10)
- 14.SOP Pengelola JDIH (3)
- 15.Kesesuaian Metadata dan Pengisian Metadata (10)

- 11.Abstrak (5)
- 12.Ruang Layanan Informasi Hukum (3)
- 13.Alat Pengolah Data dan Akses Internet (2)
- 14.Standar Website JDIH (25)
- Keamanan Website (3)
- 21.Penggunaan Aplikasi Berbasis Mobile (2)
- 22.Penggunaan Kios Informasi Elektronik (1)
- 23.Pengembangan Aplikasi yang mendukung pemanfaatan JDIH (1)
- 24.Sosialisasi JDIHN melalui Media Massa dan Media Sosial (5)
- 25.Statistik Pengunjung (1)
- 26.Statistik Dokumen (1)
- 27.MelaksanakanKegiatan/Bimtek (2)
- 28.Melakukan Study Banding / Study Tiru (2)
- 29.Inovasi Lainnya (2)





PUSAT JDIHN

# THANK YOU

P R E S E N T A T I O N



[jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)